

**PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PEMAHAMAN SAP BERBASIS
AKRUAL TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**Putri Oktavia
Nur Fatiah
Rasidah**

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Effect of Education, Training, and SAP Understanding Based on Accrual on Preparation of Financial Statements on Banjarmasin Government. This research was conducted : (1) analyze the effect of education on preparation of financial statements (2) analyze the effect of training on preparation of financial statements (3) analyze the effect of SAP understanding based on accrual on preparation of financial statements. This study was causal associative research. Population of 28 SKPD on Banjarmasin Government. The data was primary data. Data collecting method was questionnaire. Technique sampling used simple random sampling method. Sample was 23 SKPD with 69 respondents. Analysis data technique used multiple linear regression. The results showed : (1) education, (2) training, (3) SAP understanding based on accrual, were affected on preparation of financial statements.

Keywords : education, training, SAP understanding based on accrual, preparation of financial statements

ABSTRAK

Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pemahaman SAP Berbasis Akruwal terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) menganalisis pengaruh pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan (2) menganalisis pengaruh pelatihan terhadap penyusunan laporan keuangan (3) menganalisis pengaruh pemahaman SAP berbasis akruwal terhadap penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal. Populasi adalah 28 SKPD pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Jenis data adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan metode teknik simple random sampling. Sampel adalah 23 SKPD dengan 69 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) pendidikan (2) pelatihan (3) pemahaman SAP berbasis akruwal berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci : pendidikan, pelatihan, pemahaman SAP berbasis akruwal, penyusunan laporan keuangan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Banyak terjadi perubahan di Indonesia yang bersifat signifikan dan fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah, yaitu diberlakukannya otonomi daerah secara efektif. Hal ini tertuang di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara langsung pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun dibalik semua itu, terdapat beberapa kekhawatiran atas munculnya 'desentralisasi masalah'. yaitu berupa pelimpahan masalah yang belum dapat ditangani oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Hal ini tergambar dalam UU No. 32 Tahun 2004, "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ".Menurut UU No. 32 Tahun 2004, "Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Pencapaian *good governance* untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang tertuang dalam penjelasan bahwa "Otonomi daerah identik dengan tuntutan akuntabilitas, *good governance*, dan sebagainya". Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan masyarakatnya secara jujur (Enho, 2008).

Laporan keuangan merupakan alat bagi setiap entitas pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya selama satu periode kepada publik. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran 1 menjelaskan laporan keuangan yang berkualitas memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yaitu ; relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah kemudian dinilai kewajaran dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka disinilah peran lembaga independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada pasal 6 ayat 1, menyebutkan BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu indikator kualitas akuntabilitas laporan keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyusunan laporan keuangan pemerintah yang meliputi, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari : wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat dan tidak wajar.

Pemerintah Kota Banjarmasin hingga tahun 2012 belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, sebelumnya kota Banjarmasin mendapat

opini wajar dengan pengecualian (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara Tahun 2013), karenanya menarik bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pelatihan, dan pemahaman SAP berbasis akrual terhadap penyusunan laporan keuangan melalui penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Penelitian mengenai pengaruh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pernah dilakukan oleh Enho (2008), mengatakan pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif, sedangkan latar belakang pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. (Dinar, 2012), mengatakan pemahaman SAP mempunyai pengaruh positif dan signifikan, pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan, latar belakang pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan, pelatihan, dan pemahaman SAP berbasis akrual terhadap penyusunan laporan keuangan daerah dengan judul "Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pemahaman SAP Berbasis Akrual Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Banjarmasin".

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dasar Hukum SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dilingkup Pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah pusat/daerah jika menurut peraturan perundang-undangan organisasi dimaksud menyajikan laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Desember 2013. Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan akuntansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan kepala daerah paling lambat tanggal 13 Mei 2014 dan Penerapan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pada Lampiran II memuat pembahasan mengenai panduan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi

serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri, yang intinya SAPD sebagai suatu pedoman yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi :

- a) Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
- b) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
- c) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
- d) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.

Kerangka konseptual juga menjelaskan mengenai entitas akuntansi dan entitas laporan keuangan. Berdasarkan kerangka konseptual, "entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya", sedangkan "entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum".

Kerangka Konseptual SAP juga menjelaskan mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan (Kerangka Konseptual SAP, 2010). Asumsi dasar tersebut, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang.

3. Basis Akuntansi

Basis kas merupakan basis yang paling awal yang digunakan oleh satuan kerja pemerintahan, dan sampai sekarang masih banyak yang menggunakan basis kas secara umum dalam penyusunan anggaran maupun realisasi anggarannya. Selama ini basis kas telah menjadi basis utama yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam SAP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, basis kas adalah basisakuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pada awalnya, tekanan untuk mengadopsi basis akrual di sistem akuntansi pemerintahan muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dari basis kas yang tidak mampu menyajikan informasi mengenai keseluruhan aktivitas organisasi dan posisi keuangan yang seimbang antara aset dan kewajiban. Akibatnya, organisasi pemerintahan pun tidak mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif seperti yang mampu dilakukan oleh perusahaan swasta dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pasar dengan sistem akuntansi akrualnya.

Untuk mencapai sebuah solusi atas pro dan kontra basis akuntansi guna mencapai tujuan tata kelola keuangan Pemerintah yang baik, maka Pemerintah Indonesia mengadopsi sebuah basis akuntansi kas modifikasi atau *cash towards accrual* (CTA). CTA ini merupakan bagian dari tahap Pemerintah Indonesia mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual. Namun, oleh karena penerapan basis kas dalam sistem akuntansi Pemerintah sudah sangat melekat dan tidak mudah untuk merubah kebiasaan penyusunan laporan keuangan, maka basis CTA diambil sebagai langkah menerapkan basis akrual secara bertahap.

4. Kompetensi Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Menurut Wibowo (2007) Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

5. Pendidikan

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak lepas dari faktor pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Pendidikan diyakini dapat menanamkan ilmu pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai sehingga seseorang dapat meningkatkan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Effendi (2005) bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kapasitas belajar dan produktifitas seseorang. Pada dasarnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003).

6. Pelatihan

Dalam jangka pendek pelatihan merupakan suatu cara yang cukup strategis dalam membantu upaya peningkatan SDM suatu organisasi baik di pabrik maupun di kantor. Program pelatihan yang direncanakan dan

berkesinambungan dapat mendorong para pegawai untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalismenya, sehingga akan berdampak pada kinerja mereka dan pada akhirnya akan dapat peningkatan kompetensi dan performa pegawai. Menurut Ruky (2001) dalam Estiningsih (2008), "Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang dan dalam pekerjaan lain yang terkait dengan yang sekarang dijabatnya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari sebuah team kerja".

Jenis-jenis pelatihan sebagaimana terungkap dalam Peraturan Pemerintah No.101/2000 :

- a) Diklat Prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat.
- b) Diklat dalam jabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri atas:
 - 1) Diklat kepemimpinan (Diklatpim), yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
 - 2) Diklat fungsional, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
 - 3) Diklat teknis, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kedua diklat tersebut (fungsional dan teknis) untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan instansi teknis yang bersangkutan.

7. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

8. Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam suatu laporan keuangan (Kerangka Konseptual SAP, 2010). Menurut Munawir (2000) dalam Harahap (2009), "Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan atau aktivitas perusahaan tersebut".

9. Hipotesis Penelitian

- 1) Pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.
- 2) Pelatihan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.
- 3) Pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal berguna untuk mengetahui pengaruh antara tiga variabel atau lebih (Sugiyono, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini melihat seberapa besar pengaruh pendidikan, pelatihan, dan pemahaman SAP berbasis akrual terhadap penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013) populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, dan Sekretariat sebanyak 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin). Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik *Sampling* dalam penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling*, dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013). Peneliti menyusun karakteristik yang harus dipenuhi anggota sampel agar dapat digolongkan menjadi sampel. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Banjarmasin berjumlah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai sampel penelitian yang terdiri dari badan, dinas, inspektorat, kantor, dan sekretariat. Namun peneliti hanya mengambil 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai sampel penelitian. Besarnya sampel ditentukan dengan keterwakilan sampel serta teknik pengambilan sampel yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan alternatif pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada pegawai subbagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

4. Teknik Analisis Data

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan (Ghozali, 2011). Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai di bawah 0.05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali,2011).

b) Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. *cronbach alpha* yang lebih dari 0.60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

c) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel tergantung dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai *Asymp.Sig* dari One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test > 0,05. (Ghozali, 2011)

2) Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka regresi bebas Multikolinieritas (Ghozali, 2011).

3) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2011)

Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan metode Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4) Uji Parsial (uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen, maka nilai signifikannya dibandingkan dengan

derajat kepercayaannya. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 maka H_a diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak. Bila H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali,2011).

D. HASIL DAN ANALISIS

1. Hasil Pengolahan Data

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig	Keterangan
Konstanta	-4,905			
Pendidikan (X_1)	0,179	2,357	0,021	Signifikan
Pelatihan (X_2)	0,243	2,868	0,006	Signifikan
Pemahaman SAP Berbasis Akrua (X_3)	0,785	9,504	0,000	Signifikan
$t_{tabel} = 1,997$		R Square = 0,827		
R = 0,909		Adjusted R Square = 0,819		

Sumber: Data yang diolah kembali, 2014

2. Pembahasan

Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah pendidikan, pelatihan, dan pemahaman SAP berbasis akrua berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pada pemerintah Kota Banjarmasin. Uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik telah dilakukan untuk menguji kualitas data, sementara itu untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dimana data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti di subbagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

a) Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil statistik untuk menjawab hipotesis pertama berdasarkan hasil analisis uji regresi (uji t), variabel pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,357 > 1,997$) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan ($0,021 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan semakin baik pendidikan pegawai subbagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, semakin baik pula penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Wiraputra (2014) mengemukakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Wayan (2014) menjelaskan bahwa pegawai bagian akuntansi dan keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan sebagian besar pegawai sudah memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga peraturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Darise (2008) menyatakan, disadari bahwa faktor SDM adalah hal yang utama dalam menjalankan organisasi

berfungsi sebagai motor penggerak untuk jalannya roda pemerintahan, maka dalam menata SDM ini diperlukan pola yang mendukung sebagai budaya kerja untuk mengekspresikan ide-ide, bertindak dalam menentukan arah dan tujuan organisasi serta bertindak atau bekerja secara profesional menghadapi tantangan dan perubahan yang begitu cepat.

b) Pengaruh Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil statistik untuk menjawab hipotesis kedua berdasarkan hasil analisis uji regresi (uji t), variabel pelatihan berpengaruh signifikan positif terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,868 > 1,997$) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan ($0,006 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan semakin baik pelatihan pegawai subbagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, semakin baik pula penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinar (2012) menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pengaruh tersebut sebaiknya ditindaklanjuti oleh pimpinan dan seluruh jajaran untuk memberikan kualitas pelatihan yang lebih baik kepada aparatur SKPD sebab pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan, serta meningkatkan kualitas SDM dalam proses tata kelola keuangan. Pelatihan itu penting bagi pegawai, sebagaimana menurut Rivai (2004), pelatihan dalam proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.

c) Pengaruh Pemahaman SAP Berbasis AkruaI Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil statistik untuk menjawab hipotesis ketiga berdasarkan hasil analisis uji regresi (uji t), variabel pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan positif terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin. Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($9,504 > 1,997$) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan ($0,000 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan semakin baik pemahaman SAP berbasis akrual pegawai subbagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, semakin baik pula penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wayan (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Wayan (2014) menjelaskan bahwa pegawai bagian akuntansi dan keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan pemahaman pegawai tentang SAP, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak mengalami masalah. Dengan adanya pengaruh tersebut maka diharapkan ada keinginan dari pimpinan untuk meningkatkan pemahaman SAP berbasis akrual kepada seluruh pegawai dengan cara sosialisasi dan pelatihan akuntansi keuangan yang semakin ketat dilaksanakan dan memberikan materi yang berkualitas

dan mudah dipahami sehingga SDM semakin berkualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, hal tersebut didasarkan pada nilai profitabilitas signifikan dengan nilai, yakni ($0,021 < 0,05$). Kemudian variabel pelatihan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, hal tersebut didasarkan pada nilai profitabilitas signifikan dengan nilai sebesar ($0,006 < 0,05$). Serta, variabel pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, hal tersebut berdasarkan nilai profitabilitas signifikan dengan nilai, yakni ($0,000 < 0,05$). Mengingat pendidikan, pelatihan, dan pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan penyusunan laporan keuangan diantaranya: Menempatkan pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi pada bidang yang berhubungan dengan keuangan seperti pada subbagian keuangan lebih baik diisi oleh pegawai yang berlatar belakang akuntansi, agar dalam proses pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah; Meningkatkan kualitas dalam pelatihan akuntansi keuangan ataupun pelatihan mengenai pemahaman SAP berbasis akrual, agar pegawai yang ikut serta dalam pelatihan dapat memperbaiki diri dalam proses pengelolaan keuangan, dan lebih mudah memahami tata kelola keuangan yang sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010; Sebaiknya regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah jangan terlalu sering berganti kebijakan, sebab untuk memahami regulasi yang baru memerlukan pelatihan yang baru lagi bagi aparat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. "Akuntansi Keuangan Daerah". PT Indeks. Jakarta.
- Effendi, Sofyan, 2005. "Modernisasi Tata Laksana Pelayanan Publik", Makalah, Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, Yogyakarta.
- Enho, Yohanes, 2008. "Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan", Skripsi. Jurusan Akuntansi, Universitas Utara, Medan.
- Estiningsih, Retno Utami, 2008. "Penerapan *Learning Organization* Bagi Pengembangan SDM Organisasi".
- Fontanella, Amy, 2010. "Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Daerah", Jurnal. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IM SPSS 19". BP Undip. Semarang.
- Harahap, Junita Putri Rajana, 2009. "Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar", Skripsi. Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- _____, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situmorang, Dinar. 2012. "Pengaruh Pemahaman SAP Berbasis Akrual, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada Kabupaten Samosir", Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, 2012.
- Sugiyono, 2004 dan 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- _____, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Wibowo. 2007. "Sistem Manajemen Kinerja". Jakarta : Gramedia.
- Wiraputra, Wayan Kusuma, 2014. "Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Jurnal. Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.
- www.Banjarmasinkota.go.id diakses tanggal 14 Oktober 2014, Pukul 21.00 Wita
- www.beritaheadline.com/peran-pendidikan-dalam-peningkatan-kualitas-sdm-dengan-kompetensi/ diakses tanggal 7 November 2014, Pukul 20.46 Wita